

**PENGARUH KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP KINERJA
LEGISLASI DPRD KABUPATEN BANGLI**

**Komang Tri Putri Andriastuti
Putu Ngurah Suyatnayasa
I Wayan Wesna Astara**

e-mail: Putri_andriastuti@yahoo.com
putungurahsuyatna@yahoo.com
wesna_astara@yahoo.com

Magister Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Warmadewa

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of bimtek on legislative performance of DPRD of Bangli regency after bimtek. Bimtek which is one form of common perception for the entire DPRD members consisting of various backgrounds in order to carry out their duties and functions well, especially in terms of performance legislation. This research is conducted so that bimtek which is held by using APBD has an optimal impact on DPRD performance. This study uses the analysis tool PLS (Partial Least Square) with a sample of 30 people who are all members of the DPRD of Bangli Regency. The method used in this analysis is a quantitative method reinforced by qualitative analysis to determine the effect or also the relationship between two or more variables. Technique of collecting data using observation, questionnaire, interview, and also data field. The hypothesis of this research is the significant influence between bimtek and legislative performance of Bangli Regency DPRD. The results of this study indicate that bimtek significantly influence the performance of legislative DPRD Bangli regency.

Keyword : *Technical guidance, performance*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bimtek terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli setelah diadakannya bimtek. Bimtek yang merupakan salah satu bentuk persamaan persepsi bagi keseluruhan anggota DPRD yang terdiri dari berbagai macam latar belakang agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal kinerja legislasi. Penelitian ini dilakukan agar bimtek yang diselenggarakan dengan menggunakan APBD berdampak optimal terhadap kinerja DPRD. Penelitian ini menggunakan alat analisis PLS (Partial Least Square) dengan sampel sebanyak 30 orang yang merupakan keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bangli. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kuantitatif yang diperkuat dengan analisis kualitatif untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara, dan juga data lapangan. Hipotesis dari penelitian ini adalah pengaruh yang signifikan antara bimtek dan kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimtek berpengaruh signifikan terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli.

PENDAHULUAN

Good local governance merupakan *public issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan pelaksanaan Pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Lahirnya Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, digantikan dengan Undang – undang No. 32 Tahun 2004, dan digantikan kembali dengan Undang – undang No. 12 Tahun 2008, dan diterbitkannya Undang – undang No. 23 Tahun 2014 menggantikan undang – undang sebelumnya menandai dimulainya paradigma baru kebijakan otonomi daerah di Indonesia.

Undang – undang ini lahir sebagai upaya menyikapi berbagai aspirasi dan tuntutan terhadap reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sebagai Pejabat Daerah yang berkedudukan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi pembentukan Perda, membahas bersama bupati/walikota, mengajukan usul rancangan perda, menyusun program pembentukan perda dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda Kabupaten/Kota;
- b. Fungsi anggaran, membahas persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dan melakukan koordinasi dengan bupati/walikota; dan
- c. Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Perda, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, menurut Marbun (1994:129) DPRD merupakan unsur pemerintah daerah dimana susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu, DPRD mempunyai hubungan yang sangat erat dengan rakyat, karena DPRD merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan dalam pengambilan keputusan DPRD harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan aspirasi publik secara keseluruhan sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat bagi rakyatnya. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara langsung Undang – Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Dasar hukum fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD diatur dalam :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69 ayat (1) huruf a;
3. Fungsi pembentukan perda dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 ayat (1) huruf a.

Dengan demikian pemberian kewenangan kepada DPRD menjadi semakin luas sehingga harus diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang baik. Menurut PP nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 28 (1) anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berhak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Sehingga, fenomena empiris dilapangan intensitas DPRD belajar keluar daerah baik dalam bentuk studi banding maupun bimbingan teknis semakin banyak.

Sejalan dengan uraian di atas, DPRD kabupaten Bangli setiap tahunnya melaksanakan orientasi dan pendalaman tugas/bimtek untuk anggota DPRD Kabupaten Bangli. Hal ini ditempuh mengingat sumber daya manusia atau pegawai merupakan aset utama dari setiap organisasi yang dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bangli. Mengingat berhasil tidaknya organisasi akan sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi, maka melalui orientasi/pendalaman tugas atau yang dalam penelitian ini disebut dengan bimbingan teknis (Bimtek) yang salah satunya adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari kinerja terutama dalam penelitian ini terfokus pada kinerja legislasi DPRD sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dengan demikian yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah faktor – faktor bimtek sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan bimtek, dan pengaruh kebijakan bimtek berpengaruh pula terhadap kinerja legislasi DPRD dalam bentuk keputusan atau peraturan daerah. Banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD Kabupaten Bangli yang perlu diperjuangkan aspirasinya dalam bentuk suatu keputusan maka diperlukan adanya Bimtek yang mengarah kepada proses legislasi agar tercapai persamaan persepsi mengingat beragamnya latar belakang anggota DPRD di Kabupaten Bangli sehingga dapat menghasilkan peraturan yang tepat untuk kepentingan publik.

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sejauh mana sistem di bidang sumber daya manusia ini sanggup menunjang dan memuaskan keinginan pegawainya maupun organisasinya. Peningkatan pengetahuan, skill, perubahan sikap, perilaku, korelasi terhadap kekurangan – kekurangan kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui pelatihan atau salah satunya bimbingan teknis. Bimbingan teknis akan memberikan kesempatan bagi anggota DPRD dalam memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya melalui orientasi agar dapat membantu DPRD dalam bekerja dan memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat, maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah faktor anggaran, materi, dan penyelenggara dalam pelaksanaan Bimtek berpengaruh terhadap Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Bimtek terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli?

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah serta *stakeholder* terkait, sehingga dapat terwujudnya *good governance* DPRD Kabupaten Bangli. Tujuan khusus penelitian ini dimaksudkan untuk : (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bimtek terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli; (2) untuk mengetahui faktor anggaran, materi, dan penyelenggara dalam pelaksanaan Bimtek berpengaruh terhadap Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli.

Manfaat umum dari penelitian ini adalah sebagai masukan dalam merencanakan dan menjadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan program pendidikan dan pelatihan DPRD Kabupaten Bangli. Manfaat khusus penelitian ini adalah : (1) sebagai bahan masukan dan evaluasi praktek lapangan, DPRD Kabupaten Bangli terhadap hasil kerjanya didalam menjalankan tugas; (2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan evaluasi bagi tercapainya tujuan dan manfaat dari teori/bimtek bagi DPRD Kabupaten Bangli.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji persoalan tentang pengaruh bimtek/pelatihan terhadap kinerja, diantaranya adalah: (1) Ruby Awaluddin (2009), yang melakukan yang menghasilkan kesimpulan bahwa Bimtek dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan audit dan pelaksanaan Bimtek berpengaruh nyata terhadap keterampilan pegawai Badan Pengawasan Daerah; (2) Ruddy Haryadi (2015), penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan berdasarkan dimensi-dimensi implementasi kebijakan serta standar kerja yang jelas dari Pemerintah Kota Bandung, namun secara operasional belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kinerja pelayanan publik. Mengingat implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Bandung sebaiknya memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; (3) Nancy Yusnita (2014), penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara pengaruh pelatihan dengan kinerja karyawan adalah kuat dan positif, artinya semakin bagus dan baik pelatihan yang dilaksanakan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat .

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan persamaan penelitian dari beberapa penelitian ini adalah bahwa bimtek yang termasuk salah satu bagian dari pelatihan dan pengembangan, berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, bimtek atau pelatihan ini harus tetap dilaksanakan. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, dimana faktor anggaran, materi dan penyelenggara dalam bimtek sangat mempengaruhi optimalisasi kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli. Pengawasan yang kurang dari pemerintah, serta regulasi yang kurang jelas dan tegas yang menyebabkan bimtek ini kurang optimal dalam pelaksanaannya maupun hasilnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bangli. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 orang, yang merupakan keseluruhan anggota DPRD kabupaten Bangli. Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif dengan diperkuat dengan analisis kualitatif yang berupa pemaknaan. Dalam hal ini dipaparkan secara kuantitatif, faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Bimtek dan secara kualitatif diperkuat dengan hasil (*output*) dari Bimtek yaitu kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli. Faktor – faktor bimtek tersebut adalah: (1) peserta; (2) anggaran; (3) materi; (4) lokasi; (5) penyelenggara.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, angket, observasi, dan laporan kegiatan bimtek. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang berfungsi memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. Dalam hal ini data yang di deskripsikan adalah data kuantitatif melalui analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* dan kemudian di dukung oleh kualitatif agar menjadi lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan dari hasil data PLS menunjukkan bahwa pada faktor anggaran juga sangat mempengaruhi kegiatan bimtek ini. Beberapa EO (*Event Organizer*) dalam bimtek banyak bekerjasama dengan para oknum pejabat untuk melaksanakan kegiatan bimtek, sehingga hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang belum secara keseluruhan terserap yang berdampak kurang baiknya fasilitas yang di dapat. Perlu regulasi yang tegas dan jelas sehingga EO itu bisa ditindak.

Indikator materi menunjukkan bahwa pada indikator materi skor berada dibawah rata – rata. Hal ini dikarenakan waktu yang diberikan sangat sedikit, sementara materi yang akan disampaikan tidak cukup hanya dengan pembahasan materi dalam waktu 2 jam. Sehingga, untuk memaksimalkan pemahaman akan materi yang disampaikan perlu adanya penambahan waktu dan juga kegiatan bimtek yang berulang. Selain itu, adanya prosedur *pre-test* dan *post-test* dalam bimtek yang selama ini tidak di laksanakan mempengaruhi kualitas dari proses bimtek. Kurangnya evaluasi dari Badan Diklat juga monitoring dari Badan Pengembangan Manusia Kemendagri juga merupakan salah satu faktor kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan dan kualitas bimtek.

Selain beberapa indikator diatas, indikator lain yang juga berada dibawah rata – rata yaitu indikator penyelenggara. Pada indikator penyelenggara hal ini dikarenakan adanya beberapa penyelenggara yaitu EO (*Event Organizer*) “nakal” yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap waktu yang diberikan, fasilitas yang didapatkan, dikarenakan EO tersebut mempersingkat waktu yang memang telah sedikit dan juga fasilitas yang kurang baik, hal ini yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan Bimtek, dimana kegiatan Bimtek bukan hanya dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bersama DPRD melalui Sekwan, namun juga ada EO yang menyelenggarakan Bimtek yang bekerjasama dengan DPRD dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Sehingga perlu adanya aturan yang lebih jelas lagi, untuk menekan pihak – pihak yang menyebabkan kurang optimalnya kegiatan bimtek. Disamping itu, peserta yang mengikuti Bimtek dalam hal ini seluruh anggota DPRD dalam pelaksanaannya kurang optimal, dikarenakan adanya tugas lain pada saat pelaksanaan Bimtek. Sehingga tidak keseluruhan anggota dapat mengikuti Bimtek, hal ini pun mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan Bimtek tersebut.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Bimtek berpengaruh positif terhadap kinerja, dan hubungan tersebut signifikan. Hasil data tersebut diperkuat dengan hasil data kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli pada tahun 2015 belum menghasilkan Peraturan Daerah inisiatif Dewan, namun rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak masih menjadi prolegda dimana di tahun 2016 prolegda tersebut disetujui DPRD Kabupaten Bangli sehingga menghasilkan satu Ranperda inisiatif dewan yaitu Rancangan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dikarenakan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini terjadi di Kabupaten Bangli, sesuai dari data yang dihimpun dari pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Dasar dari perda inisiatif dewan Kabupaten Bangli ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini menunjukkan adanya pengaruh bimtek terhadap peningkatan kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli. Namun, melihat hasil rata – rata dari setiap konstruk dapat disimpulkan bahwa bimtek berpengaruh positif dan signifikan namun hasilnya belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil analisis dimana beberapa indikator bimtek belum berjalan dengan optimal. Ini sesuai dengan pendapat Wirawan (2012: 5), bahwa kinerja juga dapat dipandang sebagai sesuatu *output* atau suatu keluaran yang dapat dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator di dalam suatu pekerjaan atau profesi, dalam kurun waktu tertentu. Pendapat ini sejalan dengan Hamzah dan Lamatenggo (2012: 63), yang menyatakan bahwa kinerja merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang dalam organisasi untuk menghasilkan sesuatu keluaran (*output*).

Indikator ketepatan waktu dan keberhasilan kerja pada variabel kinerja menunjukkan hasil berada dibawah rata – rata, hal tersebut dikarenakan anggota DPRD yang harus melaksanakan tugas lain saat akan melaksanakan fungsinya sebagai anggota Dewan. Tugas lain tersebut bukan hanya tugas mendesak sebagai anggota DPRD namun juga tugas lain sebagai anggota Parpol. Namun apabila dilihat dari segi keberhasilan kerja, legislasi berupa peraturan daerah yang menjadi hak inisiatif dewan tidak hanya dapat dilihat dari berapa Perda inisiatif yang telah dihasilkan, namun bagaimana pelaksanaan dari Perda tersebut dan dampak bagi masyarakat Kabupaten Bangli. Evaluasi dari peraturan daerah tersebutlah yang sangat penting untuk melihat keberhasilan dari kinerja Dewan. Karena legislasi bukan hanya sekedar membuat Perda namun bagaimana kaitannya dengan implementasi dan hasil dari kebijakan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dapat di simpulkan dua hal sebagai berikut : (1) Indikator anggaran berpengaruh signifikan dan sangat menentukan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan bimtek. Penyerapan anggaran yang belum secara keseluruhan terserap kedalam kegiatan bimtek mempengaruhi hasil, kualitas, dan fasilitas yang di dapat dalam bimtek. Indikator materi pun kurang optimal, pengurangan waktu dalam kegiatan bimtek dan banyaknya pembahasan materi yang diperlukan, juga belum terlaksananya beberapa prosedur pelaksanaan bimtek menjadikan hasil (output) dari pelaksanaan bimtek belum optimal. Regulasi yang jelas dan tegas untuk menekan penyelenggara dalam kegiatan bimtek, terutama bagi EO (event organizer) yang banyak menyalahi aturan yang ada; (2) Bimtek berpengaruh positif dan signifikan namun belum optimal terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli.

Mengingat pelaksanaan bimtek berpengaruh signifikan terhadap kinerja legislasi DPRD kabupaten Bangli, dapat disarankan : (1)Sebaiknya program Bimtek di laksanakan lebih dari dua kali dalam setahun, agar peningkatan kompetensi, dan pengembangan profesi menjadi lebih baik sehingga pencapaian keberhasilan kerja dalam mengemban tugas dan fungsi pun semakin meningkat; (2)Regulasi yang ada sebaiknya ditinjau kembali, sehingga aturan yang ada dapat lebih tegas dan jelas lagi baik dari aspek penyelenggara, anggaran, materi, dan prosedur pelaksanaan bimtek, sehingga bimtek yang dilaksanakan berdampak efektif dan efisien; (3)Sekwan sebaiknya bekerjasama langsung dengan Perguruan Tinggi dan Badan Diklat, sehingga dapat menekan penyelenggara bimtek lain yaitu EO (*event organizer*), yang selama ini tidak melaksanakan bimtek sesuai prosedur sehingga bimtek berjalan kurang optimal; (4)Materi yang di berikan dalam setiap pelaksanaan bimtek sebaiknya fokus kepada salah satu fungsi DPRD sehingga peserta lebih paham akan tugas dan fungsinya, prosedur *pre – test* dan *post – test* dalam bimtek tetap dilaksanakan, sehingga hasil dari bimtek; (5)Narasumber dalam bimtek sebaiknya narasumber yang bukan hanya mempunyai pengetahuan di bidangnya saja, namun mempunyai pengalaman di bidang teknis maupun non teknis; (6)Monitoring dari Badan Diklat dan Kemendagri terhadap setiap kegiatan bimtek sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga setiap tahapan dalam pelaksanaan bimtek dapat berjalan sesuai aturan dan hasil (*output*) dari bimtek dapat dirasakan secara nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat : Bapak Dr. I Gede Agus Wibawa, AP,M.Si, yang berkenaan sebagai narasumber dan Bapak Yudistira Adnyana, SE,M.Si, yang telah memberikan kritik dan saran pada artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, B.U., Lamatenggo, N., 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta
- Wirawan, 2008. *Budaya dan Iklim Organisasi Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Awaluddin, Rudy, 2009 “*Analisis Pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Peningkatan Keterampilan Pegawai Pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor*,” Jawa Barat : Program Sarjana Manajemen Penyelenggaraan Khusus Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Haryadi, Ruddy, 2015 , Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1 *Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pelayanan Publik*.
- Nancy Yusnita (2014), Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE) Volume Semester I 2014, *Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.